

## **ABSTRAK**

Grafik menunjukkan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak mengalami peningkatan. Salah satu wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati yang pada Pilkada serentak Tahap Kedua juga hanya diikuti oleh Satu Pasangan Calon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjawab, dan menganalisis rumusan masalah mengenai bagaimana Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Apakah terdapat kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Bagaimanakah solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian secara yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penulis menganalisis masalah menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Otonomi Daerah, dan Teori Pemilu.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi Asas Pemilu. Kedua, kendala yang ada adalah munculnya Surat edaran KPU RI Nomor : 533/KPU/IX/2016, tanggal 27 September 2016, munculnya gerakan relawan kolom kosong menjadi hal yang baru dalam demokrasi, dan kolom kosong yang bukan sebagai peserta dalam Pilkada Pati 2017 tidak bisa menempatkan saksi-saksi di TPS karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Ketiga, solusinya adalah KPU Kabupaten Pati sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkada Pati 2017 harus melaksanakan surat edaran itu, dan KPU Kabupaten Pati tidak bisa melarang relawan kotak kosong untuk berkampanye, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Kata Kunci : Pilkada Pati 2017, Pilkada Satu Paslon, Tahapan Pilkada.

## **ABSTRACT**

The graph shows that the Regional Head Election with One Candidate Pair in Simultaneous Local Election have increased. One of the regions in Central Java is Pati Regency which in the simultaneous Second Stage Election was also only attended by One Candidate Pair.

This research aims to find out, answer, and analyze the statement of the problem of how the Pilkada Pati 2017 with One Candidate Pair, Are there obstacles in the implementation of Pilkada Pati 2017 with One Candidate Pair, How is the solution to the obstacles solving that arise in organizing the Pilkada Pati 2017 with One Candidate Pair.

The research method used in this research is sociological juridical. Sociological juridical research is a legal research that uses the secondary data as a beginning and then continued with the primary data or the field data. The authors analyzed the problem using the People's Sovereignty Theory, Regional Autonomy Theory, and Election Theory.

The results of this study can be concluded that, First in general the implementation of the Election of Pati Regent and Vice-Regent in 2017 runs smoothly, orderly and safely as the democratic principle that upholds the Election Principle. Second, existing constraints are there was the emergence of Circular of KPU RI Number: 533 / KPU / IX / 2016, dated 27<sup>th</sup> of September 2016, there was emergence of the empty column volunteer movement became a new thing in democracy, and the empty column which is not a participant in the Pati Election 2017 cannot place witnesses at the TPS because there are no rules governing this. Third, the solution is the Pati General Election Commission (KPU) as the organizer and the responsible person in the Pati Regional Head Election 2017 must implement the circular letter, and the KPU of Pati Regency cannot prohibit the volunteers of empty column to campaign, as a manifestation of people's sovereignty.

Keywords: Pati Regional Head Election 2017, One Paslon (Candidate Pair) Election, Pilkada Stages.